

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BARITO KUALA

Febriati Atika Sari¹, Dewi Merdayanty², Junaidy³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 19120238

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 1104017302

³Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 1102088702

Email: febriatis@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Barito Kuala dan faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Barito Kuala masih kurang baik dilihat dari : (1) Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi terkait dengan peraturan yang ada masih kurang optimal sehingga kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dari segi sumber daya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala masih kekurangan sumber daya manusia lebih tepatnya personil lapangan pengangkut sampah dan terbatasnya dana anggaran yang mengakibatkan masih terbatasnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti truck armada pengangkut sampah. Dari segi disposisi, sikap dari pihak pelaksana sudah menunjukkan komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang baik dalam pelaksanaan kebijakan peraturan yang ada. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala dan *fragmentasi* yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, kecamatan, serta masyarakat. (2) Faktor penghambat terdiri dari tidak optimalnya kegiatan sosialisasi, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, terbatasnya anggaran yang mengakibatkan terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah □

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Delly dan Arif. (2019). Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. AA. Rizky.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, M. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan, M. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII Bandung.
- Yulianto Kadji, M. (2015). *Formulasi dan implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.

Jurnal

- Iskandar, A. A. (2018). Pentingnya Memelihara Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga. *Jurnal Ilmiah Pena*, 79-84.
- Juriko Abdussamad, F. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- M. Farhan Surya Novaldi, A. B. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojongnegara Kab. Serang. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*.
- Prasetya, Y. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Siti Marsyah, L. F. (2021). Perancangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kota Pontianak. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*.

Peraturan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 Tentang HAM terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 65 ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022.

Skripsi

Bella Dwi Hastuti, F. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*.

Pratiwi, A. P. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Suhairia, R. (2021). Implementasi Perda No 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Webslte

Perwakilan, K. (2023, Maret 22). *Ombudsman Kassel Respon Cepat Keluhan Masyarakat di Kegiatan PVL On The Spot*. Diakses Maret 27/2023, dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwk--ombudsman-kassel-respon-cepat-keluhan-masyarakat-di-kegiatan-pvl-on-the-spot>